

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi 2 Cetakan. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- _____. *Pembaharuan Kejaksaan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Car, Jun. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Cetakan. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Farida, Maria Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Cetakan. 9. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hikmawati, Puteri. *Penyadapan Dalam Hukum di Indonesia Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Cetakan. 1. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cetakan. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan. 9. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan. 1. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Cetakan. 1. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Kosasih, Ade dan John Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan. 1. Penerbit Vanda, Bengkulu, 2017.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya, Jakarta, 2011.

- Manthovani, Reda. *Penyadapan VS Privasi*. Cetakan. 1. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015.
- Mariangka, Jan. S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan. 6. Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Cetakan. 10. Kencana, Jakarta, 2017.
- Ma'ruf, Umar dan Aga Wigana, *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan. 1. Unissula Press, Semarang, 2020.
- M. Hadjon, Philipus. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan. 2. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan. 2. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- O.S, Eddy Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Cetakan. 1. Erlangga, Jakarta, 2012.
- Umar, Nassarudin dan Nadhifah Attammi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*. Cetakan. 1. LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2020.
- Ramadhan, Choky dan Aulia Ali Reza K. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Cetakan. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Waluyu, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Cetakan. 2. Rajawali Press, Depok, 2017.
- _____. *Pidana dan Pemidanaan*. Edisi 1 Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. JURNAL

Aak Mufrohim, dan Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>, Pada tanggal 09 Juni 2022, Pukul 15.10 WIB.

Damian Agata Yuves, Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa, “Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 3, 2017. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1578/1454>, Pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 13.27 WIB.

Deto Adityan Subagja, Anang Shophan Tornado, Ifrani, Muhammad Rizki Anugerah, “Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol 16 No. 2, 2021. Diakses dari <https://ejournalunsa.id/index.php/jhsk/article/download/3426/2953/>, Pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 00.31 WIB.

Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, *Fiat Justitia*, Vol. 1 No.1, 2013. Diakses dari <http://s://mappifhui.org/wp-content/upload/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>, Pada tanggal 01 April 2022, Pukul 21.40 WIB.

Eko Ari Wibowo, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *JurnalYuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 42. Diakses dari <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.55 WIB.

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol.2 No. 1, 2019, hlm.7. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/290621-penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-arsp-6a62615615e.pdf>, Pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 21.56 WIB.

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, “Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2, 2013. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/37034-ID-kewenangan-jaksa-dalam-penyidikan-tindak-pidana-korupsi.pdf>, Pada tanggal 05 Juni 2022, Pukul 09.28 WIB.

- Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No 1, 2021. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 15.58 WIB.
- Muchammad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No.1, 2017, hlm. 8. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-None.pdf>, Pada tanggal 07 Juni 2022, Pukul 10.47 WIB.
- Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2016. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.pdf>, Pada tanggal 16 April 2022, Pukul 06.08 WIB.
- Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No 1, 2021. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>, Pada tanggal 04 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB.
- Ook Mufrohim, Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/8807/4513>, Pada tanggal 15 Juni 2022, Pukul 15.01 WIB.
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No 1, 2016. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/5796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastianhukum.pdf>, Pada tanggal 05 April 2022, Pukul 06.40 WIB.
- Syaifullah Yophi Ardiyanto, dan Tengku Arif Hidayat, “Pola Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/12556>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.03 WIB.
- Totok Sugiarto, dan Purwanto, “Analisa Hukum Terhadap Penyadapan”, *Jurnal IUS*, Vol. X No. 01, 2022. Diakses dari <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/download/965/821/>, Pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 13.32 WIB.

Syifa Fachrunisa, “Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1, 2021. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/333051/4534>. Pada tanggal 21 Mei 2022, Pukul 16.45 WIB.

Vani Kurnia Sandi, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 1 No. 3, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.11 WIB.

Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan pidana In donesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019. Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.55 WIB.

Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, dan Nys Arfa, “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 1 No. 3, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/12556>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.03 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang *Negara Tahun 1945*.

_____. Undang-Undang *Tentang Kitab Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.

_____. Undang-Undang *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401.

_____. Undang-Undang *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6755.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 006/PUU-1/2003, Tanggal 29 Maret 2004”.

_____. “Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Tanggal 18 Desember 2006”.

_____. “Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Tanggal 24 Februari 2011”.

D. INTERNET

<https://m.antaranews.com/amp/berita/258760/pakar-perlu-pedoman-pelaksana-penyadapan-untuk-uu-kejaksaan-baru>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 17.03 WIB.

<https://www.kompas.tv/amp/article/239998/videos/jaksa-kini-boleh-menyadap-jaksa-agung-jangan-disalahgunakan-ini-terkait-privasi>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.59 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-penyadapan-kejaksaan-har-us-diatur-ketat-dan-terukur>. Diakses pada tanggal 06 Maret 2022, Pukul 20.09 WIB.